

DAFTAR PUSTAKA

a. Buku Teks

- Aminuddin dan Asikin, Pengantar Metode Penelitian Hukum, (Depok: Rajagrafindo Persada, 2010)
- Endraswara, Suwardi, Metode, Teori, Teknik Penelitian Kebudayaan, (Yogyakarta: Pustaka Widyatama, 2006)
- Gulo, W., Metodologi Penelitian, (Jakarta: Grasindo, 2000)
- H.S, Salim, Dasar-dasar Hukum Kehutanan, (Jakarta : Sinar Grafika, 2003)
- Ibrahim, Metodologi Penelitian Kualitatif, (Bandung: Alfabeta, 2015)
- J.R., Raco, Metode Penelitian Kualitatif, Jenis, Karakter dan Keunggulannya, (Jakarta : Grasindo, 2010)
- Muhammad, Bushar, Pokok-pokok Hukum Adat, (Jakarta: Pradnya Paramita, 1981)
- Nazir, Moh., Metode Penelitian, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2003)
- Noor, Aslan, Konsep Hak Milik Atas Tanah Bagi Bangsa Indonesia Ditinjau Dari Ajaran Hak Asasi Manusia, (Bandung: Mandar Maju, 2006)
- Redi, Ahmad, Hukum Sumber Daya Alam dalam Sektor Kehutanan, (Jakarta: Sinar Grafika, 2014)
- Samosir, Djamanat, Hukum Adat Indonesia, (Medan: CV. Nuansa Aulia, 2013)
- Soekanto, Soerjono, Hukum Adat Indonesia, (Jakarta: PT. Rajawali, 1983)
- Sudiyat, Iman, Hukum Adat Sketsa Asas, (Yogyakarta: Liberty, 1989)
- Wignjodipuro, Surojo, Pengantar dan Asas-asas Hukum Adat, (Jakarta: Gunung Agung, 1983)

Zain, Alam Setia, Aspek Pembinaan Kawasan Hutan dan Stratifikasi Hutan Rakyat, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1998)

Zainuddin, Ali, Metode Penelitian Hukum, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009)

b. Jurnal

Efendi, Rahmad, et.al, “Dampak Penguasaan Halimun Oleh Pemerintah dan Korporasi Terhadap Kehidupan Masyarakat Adat Kasepuhan Ciptagelar”, Jurnal Antropologi Ekologi, Jurusan Antropologi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Padjajaran, 2011

Hermanto, et.al, “Filosofi Hidup Sebagai Basis Kearifan Lokal (Studi Pada Kesatuan Masyarakat Adat Banten Kidul)”, Jurnal GEA, Universitas Pendidikan Indonesia, 1 April 2012

Khomsan, Ali, et.al, “Ketahanan Pangan dan Gizi Serta Mekanisme Bertahan Pada Masyarakat Tradisional Suku Ciptagelar di Jawa Barat”, Jurnal Ilmu Pertanian Indonesia, Institut Pertanian Bogor, 2013

c. Karya Ilmiah yang Tidak Dipublikasikan

Rahayu, Siti Sri, “Makna Hutan Bagi Masyarakat Adat (Studi Kasus Kesatuan Adat Banten Kidul, Kasepuhan Ciptagelar)”, (Skripsi Sarjana Pertanian, Fakultas Pertanian, Institut Pertanian Bogor, 2004)

Tobing, Rodslowny L., “Penguatan Status Hukum Masyarakat Ciptagelar Melalui Identifikasi Batas dan Visualisasi Spasial Tanah Adat” (Tesis Magister Teknik Geodesi dan Geomatika, Institut Teknologi Bandung, 2008)

d. Karangan

Cahyono, Eko, “Konflik Agraria dan Hak Masyarakat Hukum Adat di Kawasan Hutan”,

Policy Paper No. 01-PP SAINS 2016, (Bogor : Sajogyo Institute,2016)

Suganda, Ki Ugis, “Komunitas Masyarakat Adat Kasepuhan Ciptagelar”, Hutan

Adat Untuk Masa Depan : Pengelolaan Hutan Adat di Tengah Arus Perubahan

Dunia, (Jakarta: Aliansi Masyarakat Adat Nusantara dan Down To Earth, 2013)

e. Sumber Internet

www.halimunsalak.org, diakses pada tanggal 12 November 2016 pukul 14.20 WIB

www.mongabay.co.id, diakses pada tanggal 8 Maret 2017 pukul 17.30 WIB

f. Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-undang No. 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistem

Undang-undang No. 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan

Peraturan Menteri Agraria No. 5 Tahun 1999 Tentang Pedoman Penyelesaian Masalah Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat

Peraturan Menteri Kehutanan No. 56 Tahun 2006 Tentang Pedoman Zonasi Taman Nasional

Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 2011 Tentang Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam

Putusan MK No. 35/PUU-X/2012

Undang-undang No. 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan
Perusakan Hutan

Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia, Menteri
Kehutanan Republik Indonesia, Menteri Pekerjaan Umum Republik
Indonesia, dan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor
: 79 Tahun 2014, Nomor : PB.3/Menhut-11/2014, Nomor : 17/PRT/M/2014,
Nomor : 8/SKB/X/2014 Tentang Tata Cara Penyelesaian Penguasaan Tanah
Yang Berada Didalam Kawasan Hutan

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No : P.32/Menlhk-
Setjen/2015 Tentang Hutan Hak

Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional
Republik Indonesia No. 10 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Penetapan Hak
Komunal Atas Tanah Masyarakat Hukum Adat dan Masyarakat yang Berada
Dalam Kawasan Tertentu